



Tantangan dan Harapan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Wilayah Provinsi Bali

Gita Apsari Dewi^{1*}, Anak Agung Ayu Intan Wulandari² 

^{1,2} Program Studi Ilmu Administrasi Niaga, Universitas Bali Internasional, Denpasar, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 2023-07-15

Revised: 2023-09-25

Accepted: 2023-10-05

Available Online: 2023-12-25

Kata Kunci:

SIPKD; Pemerintahan Daerah, Laporan Keuangan

Keywords:

SIPKD; Regional Government, Financial Reports

DOI:

<https://doi.org/10.38043/jimb.v7i2.3799>

ABSTRAK

Pemerintah Provinsi Bali telah menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah sejak tahun 2010 dan hingga saat ini telah ada 49 organisasi perangkat daerah yang menggunakan SIPKD. Penerapan SIPKD memberikan manfaat terhadap penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan auditabel. SIPKD memberikan kemudahan bagi organisasi perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mempertanggungjawabkan laporan keuangan kepada para pemangku kepentingan. Pemahaman sumber daya manusia menjadi kendala atas pemanfaatan SIPKD dan masih adanya perdebatan mengenai hasil penelitian mengenai aspek sistem, layanan, dan informasi SIPKD sehingga menjadi perhatian penting dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis atas implementasi SIPKD di sektor Pemerintahan Daerah Provinsi Bali, serta uraian atas kelebihan dan kelemahan atas pengimplementasian SIPKD. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Peneliti mengkaji sumber-sumber informasi yang relevan dari berbagai literatur terkait implementasi SIPKD di Provinsi Bali. Secara keseluruhan, implementasi SIPKD di Provinsi Bali mampu memberikan manfaat bagi organisasi perangkat daerah jika diukur dari persepsi pengguna atas aspek sistem, informasi, dan pelayanan, sehingga ini berimplikasi pada terwujudnya pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien. Pemahaman sumber daya manusia yang rendah dan kurangnya pemberian pelatihan masih menjadi kendala atas kesuksesan implementasi SIPKD.

ABSTRACT

The Bali Provincial Government has implemented a Regional Financial Management Information System since 2010 and to date, 32 regional organizations use SIPKD. The implementation of SIPKD provides benefits for the implementation of effective, efficient, transparent, accountable, and auditable regional financial management. SIPKD makes it easy for regional organizations to realize good governance and account for financial reports to stakeholders. Understanding human resources is an obstacle to the use of SIPKD and there is still debate regarding the results of research regarding aspects of the SIPKD system, services, and information so it is an important concern in this research. This research aims to provide an analysis of the implementation of SIPKD in the Bali Province Regional Government sector, as well as a description of the strengths and weaknesses of implementing SIPKD. This research uses a qualitative descriptive method with a literature study approach. Researchers examined relevant sources of information from various literature related to SIPKD implementation in Bali Province. Overall, the implementation of SIPKD in Bali Province can provide benefits for regional organizations if measured from user perceptions of system, information, and service aspects, so this has implications for the realization of more effective and efficient financial management. Low understanding of human resources and lack of training are still obstacles to the success of SIPKD implementation.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. PENDAHULUAN

Dalam rangka mencapai pemerintahan yang baik maka diperlukan tata kelola pemerintahan yang dapat menunjang kebutuhan *stakeholders*. Untuk itu pemerintah telah melakukan perubahan dengan menggunakan media internet terhadap administrasi dan pengelolaan data seiring adanya tuntutan atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Sari, 2013). Aktualisasi atas penggunaan internet ini dapat dilihat dari penerapan sistem informasi akuntansi pada seluruh proses mulai dari pengarsipan, pengolahan, dan pelaporan. Handojo et al., (2004) menyebutkan penerapan sistem informasi akuntansi dapat memberikan berbagai manfaat, diantaranya menghasilkan informasi yang akurat dan tepat waktu, meningkatkan kualitas, mengurangi biaya, meningkatkan pengambilan keputusan yang tepat, dan meningkatkan pembagian pengetahuan (*sharing knowledge*). Kemajuan teknologi tidak hanya dengan cepat diterapkan pada sektor swasta, namun juga sektor pemerintahan adaptif dan merespon positif dengan merealisasikan penggunaan sistem informasi akuntansi.

Pemanfaatan SIA dalam birokrasi pemerintahan dapat berimplikasi pada percepatan tugas dan tanggung jawab para staf, hal ini menandakan bahwa kinerja para staf mengalami peningkatan dibandingkan dengan penggunaan sistem tradisional. Sejatinya tata cara pengelolaan keuangan tidak dilakukan secara berkesinambungan sehingga dengan adanya SIA dapat mengurangi ketidakefisienan dan dapat menghasilkan informasi keuangan yang dapat diandalkan (Halim et al., 2012). Pemerintah pusat berkewajiban mengumpulkan seluruh data keuangan yang diperoleh dari setiap daerah untuk kemudian dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Terdapat beberapa aturan yang mendasari atas pelaporan keuangan tersebut yang harus diperhatikan dengan seksama. Salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 yang menjadi pedoman penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) bagi pemerintah daerah menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pemerintah Provinsi Bali telah menerapkan SIPKD sejak tahun 2010 dan telah ada 49 organisasi perangkat daerah yang menerapkan sistem tersebut. Penerapan SIPKD memberikan manfaat terhadap penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan auditabel. Sesuai dengan visi pembangunan Provinsi Bali yang memiliki program prioritas untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bertransformasi menuju digitalisasi (Ariani, 2023), sehingga implementasi SIPKD di Provinsi Bali menjadi kajian menarik yang dibahas dalam penelitian ini.

Suryaningrat & Utama (2018) menyebutkan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan yaitu menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada pemangku kepentingan sehingga dapat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan keuangan dapat berdampak pada terwujudnya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik (Sari, 2013). Adanya penerapan tata kelola yang baik, mekanisme pengawasan yang kuat, dan partisipasi publik, maka proses perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan, dan pelaporan menjadi lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Perbaikan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas dapat berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh sebab itu, dibutuhkan sistem informasi akuntansi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyimpan data keuangan, melacak transaksi keuangan, mengintegrasikan informasi dari berbagai unit dan departemen, memantau kinerja keuangan secara *real time*, serta mengidentifikasi potensi risiko keuangan dan operasional.

Aspek sistem, informasi, dan pelayanan menjadi komponen penting atas kesuksesan implementasi SIPKD, hal ini dikarenakan ketiga aspek tersebut menjadi faktor penting atas kepuasan yang dirasakan organisasi perangkat daerah (Wicaksono & Mispiyanti, 2019). Hasil penelitian sebelumnya didukung pula oleh Dewi et al., (2017) yang menyatakan kepuasan organisasi perangkat daerah didukung dengan adanya sistem dan informasi yang memadai yang tersedia pada sistem. Bertentangan dengan hasil tersebut, penelitian Rahmawati et al., (2022) menyebutkan jika sistem dan informasi SIPKD tidak mampu memberikan kepuasan organisasi perangkat daerah, ini disebabkan karena masih lemahnya keamanan data pada sistem dan kurangnya pemahaman terhadap fitur-fitur yang tertera pada sistem. Pemanfaatan SIPKD yang dirasakan belum optimal oleh organisasi perangkat daerah dikarenakan sistem baru berjalan juga disebutkan dalam penelitian (Brawijaya & Yenni Latrini, 2020). Kurang memadainya kompetensi sumber daya manusia baik dari segi kualitas dan kuantitas juga mempengaruhi berjalannya SIPKD (Khairunnas et al., 2021). Masih adanya perbedaan persepsi yang dirasakan oleh organisasi perangkat daerah tersebut sehingga penelitian ini mengkaji kembali pemanfaatan SIPKD khususnya di Provinsi Bali.

SIPKD yang digunakan memiliki berbagai kelebihan, yang diantaranya mempermudah proses perencanaan dan keuangan daerah, evaluasi atas proses perencanaan keuangan dan kinerja dapat dilakukan secara elektronik, memudahkan pemantauan *database* keuangan nasional dan daerah, serta analisa data daerah secara nasional dapat lebih mudah dilakukan (Claudio, 2023). Berbeda halnya dengan pernyataan sebelumnya, pemanfaatan SIPKD nyatanya masih memiliki beberapa kelemahan, diantaranya belum adanya integrasi antara bagian perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan aset, adanya kesalahan sumber daya manusia dan kendala teknis atas jaringan pendukung sistem, dan dilakukan mutasi staf yang menyebabkan kurangnya pemahaman dan pengalaman menjalankan SIPKD (Suryaningrat & Utama, 2018). Faktor sumber daya manusia begitu disoroti mengingat keberhasilan pemanfaatan sistem dan ketepatan waktu penyampaian laporan sangatlah tergantung pada kemampuan dan pengalaman mereka. Pernyataan ini didukung oleh Wansyah et al., (2012) yang mengatakan jika pengelolaan keuangan sudah semestinya didukung sumber daya manusia yang handal dan latar belakang pendidikan yang sesuai, didukung pula memiliki pengalaman dan pernah mengikuti pelatihan di bidang terkait.

Kesuksesan sistem informasi akuntansi sebagai sarana untuk mengolah data keuangan hingga menghasilkan laporan juga menjadi hal yang krusial. Hasil penelitian sebelumnya yang membahas aspek sistem, pelayanan, informasi, sumber daya manusia cukup mengalami perdebatan yang dikarenakan perbedaan persepsi yang dirasakan di setiap organisasi perangkat daerah Provinsi Bali. Urgensi penelitian ini memfokuskan pada persepsi dan pemahaman organisasi perangkat daerah yang telah menggunakan SIPKD, sehingga dapat ditarik gambaran mengenai implementasi SIPKD di Provinsi Bali dari aspek sistem, informasi, pelayanan, dan pemahaman berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dari penjabaran tersebut, maka dapat dirumuskan

masalah penelitian ini yaitu bagaimana implementasi SIPKD di Sektor Pemerintahan Provinsi Bali serta kelebihan dan kelemahan implementasi SIPKD yang dirasakan oleh organisasi perangkat daerah. Melalui penelitian studi literatur ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap kajian teoritis dan praktis atas implementasi SIPKD di Provinsi Bali sehingga tercapainya pelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Pendekatan studi literatur digunakan untuk menangkap fenomena atas persepsi pengguna Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, kemudian dari studi literatur yang dilakukan dapat memberikan gambaran atas kesuksesan implementasi SIPKD di Provinsi Bali. Persepsi kepuasan pengguna yang diukur dari aspek sistem, informasi, dan pelayanan, serta pemahaman pengguna digunakan sebagai bahan kajian dalam mengungkap masalah penelitian yang telah dirumuskan. Berdasarkan konsep Creswell, tahapan penelitian kualitatif terdiri atas pengidentifikasian masalah, penelusuran literatur, penentuan tujuan dan sasaran, pengumpulan data, analisis dan interpretasi data, serta pelaporan (Creswell & Creswell, 2018). Teknik validasi data menggunakan triangulasi sumber dengan menggabungkan berbagai data dan sumber yang ada. Peneliti mengkaji sumber-sumber informasi yang relevan dari berbagai literatur dengan harapan dapat mengupas secara komprehensif terkait persepsi pengguna atas pemanfaatan SIPKD di Provinsi Bali.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan aplikasi yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah dengan mengacu pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel (Darmayani, dkk, 2014). Aplikasi ini perwujudan terciptanya persamaan persepsi antara sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam menginterpretasikan dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan terkait. SIPKD telah dimanfaatkan oleh berbagai organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah pusat dan daerah Provinsi Bali. Penelitian yang dilakukan oleh Suryaningrat & Utama (2018) menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Pemerintah Provinsi Bali dapat dikatakan efektif. Penerapan SIPKD pada Pemerintah Provinsi Bali mampu mendukung pengelolaan keuangan baik dari segi penganggaran, penatausahaan, maupun pelaporan serta dapat memberi manfaat bagi organisasi pengguna yaitu dengan terselenggaranya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan auditabel.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan pada penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa penerapan SIPKD sangat membantu dalam penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif dan efisien. Penelitian yang dilakukan oleh Deviyanti & Erlina Wati (2022) menunjukkan bahwa sesuai dengan teori Keagenan, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) bertindak sebagai pendukung peningkatan akuntabilitas laporan keuangan dalam pertanggungjawaban lembaga kepada pemerintah pusat. Organisasi perangkat daerah berkewajiban untuk melaporkan kinerja daerah yang tercermin pada LKPD kepada pemerintah pusat, hal ini berkaitan erat dengan teori keagenan yang memandang hubungan antara pemerintah pusat sebagai pihak prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen (Jensen & Meckling, 1976). Pemerintah Provinsi Bali perlu memiliki SIPKD yang berkualitas guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan berbagai peraturan pengelolaan keuangan di daerah, transparansi, akuntabilitas, dan terkendali untuk pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang baik. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian sebelumnya tidak sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2013) yang menyebutkan kualitas sistem dan pengguna aktual masing-masing tidak berpengaruh pada implementasi SIPKD. Dari segi kualitas sistem menunjukkan bahwa sistem dirasakan tidak mudah digunakan, tidak cepat, tidak handal, tidak fleksibel, dan tidak aman melindungi data yang menyebabkan gagalnya penerapan sistem informasi. Sedangkan, dari segi pengguna aktual menunjukkan bahwa kurangnya partisipasi, keikutsertaan serta kemampuan dari pengguna.

Penelitian yang dilakukan oleh Evicahyani & Setiawina (2016) menunjukkan bahwa pemanfaatan SIPKD memiliki peran dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tabanan karena melalui SIPKD Laporan Keuangan yang dihasilkan dapat menjadi lebih cepat, tepat, dan akurat sehingga dapat terselesaikan tepat waktu. Penelitian yang dilakukan oleh Wartini & Yasa (2016) menunjukkan bahwa berdasarkan persepsi pengguna, implementasi SIPKD sudah efektif dalam membantu pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan) keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana. Penyelenggaraan SIPKD sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pengguna, khususnya terkait dengan produktivitas kerja. Hal ini karena dengan menggunakan sistem informasi, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas menjadi lebih singkat. Penelitian yang dilakukan oleh Mahaputra & Putra (2014) menunjukkan bahwa pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) memiliki peran dalam meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2013) menunjukkan bahwa kualitas informasi dan kepuasan pengguna berperan pada implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah di Kota Denpasar. Informasi yang akurat dapat mengakibatkan keputusan yang diambil menjadi lebih tepat sasaran. Sedangkan, kepuasan yang dirasakan pengguna akan berdampak pada tingkat keberhasilan penerapan SIPKD. Teori organisasi pembelajaran menyebutkan jika organisasi secara terus menerus mengembangkan kapasitasnya untuk mempelajari sesuatu secara bersama-sama (Senge, 1990). Oleh karena itu, keberhasilan penerapan SIPKD relevan dengan teori Organisasi Pembelajaran dimana organisasi perangkat daerah berproses memanfaatkan SIPKD dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan keuangan daerah sesuai dengan aturan yang berlaku. Selama proses transisi tersebut berjalan, para organisasi perangkat daerah diberikan teori dan praktik hingga siap mengoperasikan sistem secara individu.

Sisi Dualisme: Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda. Melihat berbagai kelebihan yang diperoleh atas pemanfaatan SIPKD dibandingkan dengan sistem secara tradisional, nyatanya memberikan perubahan yang signifikan di berbagai pemerintahan daerah Provinsi Bali. Dari hasil penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa SIPKD terbukti efektif dari segi penggunaan waktu, mengurangi ketidaktepatan dalam menangani berbagai transaksi, relevan dalam menyajikan data yang dibutuhkan, dan mampu menyediakan informasi yang berkualitas (Parnami & Damayanthi, 2013). Berbagai kelebihan yang dihasilkan atas pemanfaatan SIPKD dapat menunjang tata kelola pemerintahan pusat dan daerah yang baik yang tercermin pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang reliabel. Terwujudnya akuntabilitas laporan pemerintah pusat dan daerah dapat memberikan kepercayaan bagi para pemangku kepentingan, yang cenderung skeptis dengan kinerja para organisasi perangkat daerah.

Bertolak belakang dengan berbagai kelebihan yang diuraikan, sumber daya manusia merupakan salah satu prediktor utama dalam kesuksesan berjalannya SIPKD ini, dimana sebelumnya para staf diberikan pendidikan dan pelatihan dalam mengoperasikan sistem keuangan daerah ini. Dari penelitian sebelumnya menyebutkan adanya rotasi staf di divisi terkait yang menyebabkan pengelolaan keuangan daerah melalui SIPKD mengalami hambatan. Beberapa staf mengalami ketidakmerataan dari segi kualitas dan kuantitas yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah, hal ini berakibat pada penyampaian laporan keuangan yang tidak tepat waktu dan tidak selaras. Bukannya mengalami kemajuan dari setiap aspek terkait saat pengimplementasian SIPKD, melainkan menyebabkan kemunduran yang dikarenakan sumber daya tersebut belum siap dengan perubahan teknologi yang ada.

Sisi lainnya bahkan organisasi perangkat daerah seakan bergantung dengan pihak ketiga, yang dalam hal ini pihak vendor yang mengembangkan SIPKD tersebut jika di situasi tertentu sistem mengalami kendala teknis. Operator SIPKD yang bertanggungjawab atas bidang pekerjaan teknis mengemban tugas yang besar untuk tercapainya tujuan penyelenggaraan SIPKD, sehingga tidak tepat jika operator tersebut diberikan tugas yang melebihi kapasitasnya. Jika hal tersebut terjadi, maka berakibat pada pergantian staf operator dan admin SIPKD yang kerap berganti setiap tahunnya sehingga mengakibatkan ketidakefisienan (Suryaningrat & Utama, 2018). Operator sistem di masing-masing SIPKD bergantung dengan konsultan apabila terjadi kesalahan yang dikarenakan faktor sumber daya manusia dan sistem aplikasi maka ini memerlukan waktu untuk menjadikan sistem kembali normal (Wartini & Yasa, 2016).

Penyelenggaraan pelatihan kepada para staf yang telah dilakukan hanya sebatas kebutuhan, padahal diperlukan pelatihan secara lebih mendalam atas pengembangan sistem dan sumber daya manusia. Pelatihan yang diberikan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang terpercaya dan kompeten sehingga dapat meningkatkan kemampuan para staf terkait. Sumber daya manusia yang kurang kompeten akan berpengaruh pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kesuksesan penyelenggaraan SIPKD sangat bergantung pada pelayanan yang cepat dan transparan yang dapat diberikan oleh staf yang bertugas. Kepuasan pengguna menjadi ukuran atas kesuksesan penyelenggaraan SIPKD, sehingga berbagai persepsi para pengguna layanan SIPKD dapat memberikan saran yang konstruktif atas kekurangan yang timbul. Maka dari itu perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh para staf sehingga jika masih adanya kendala dan hambatan yang ditemukan, harus adanya solusi yang membangun demi kepentingan dan kebutuhan para pemangku kepentingan.

4. SIMPULAN

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan aplikasi yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah dengan mengacu pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel (Winarni et al., 2020). Implementasi SIPKD pada Pemerintah Provinsi Bali mampu mendukung pengelolaan keuangan baik dari segi penganggaran, penatausahaan, maupun pelaporan. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Suryaningrat & Utama (2018) yang menyebutkan penerapan Sistem Informasi Pengelolaan

Kuangan Daerah (SIPKD) pada Pemerintah Provinsi Bali telah berjalan dengan efektif dengan mengukur dari persepsi pengguna atas aspek sistem, informasi, pelayanan sehingga ini berimplikasi pada terwujudnya pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan sistem tradisional. Berbagai penelitian sebelumnya juga mendukung pernyataan tersebut bahwasanya penyelenggaraan SIPKD sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerja organisasi perangkat daerah, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berbanding terbalik dengan kelebihan yang timbul atas implementasi SIPKD, pemahaman sumber daya manusia terhadap pengoperasian sistem masih menemukan hambatan dikarenakan terjadi rotasi staf terkait dan pemberian pelatihan yang kurang mendalam, sehingga ini mengakibatkan terlambatnya penyampaian laporan keuangan kepada pimpinan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh para staf dan adanya solusi yang membangun demi kepentingan para pemangku kepentingan. Penyelenggaraan SIPKD diharapkan dapat menunjang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah sehingga dapat tercapainya *good government governance*. Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian ini, antara lain (1) penelitian selanjutnya dapat menggunakan meta analisis studi literatur sehingga dapat memperoleh gambaran secara lebih luas mengenai pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) oleh organisasi perangkat daerah di organisasi pemerintahan Provinsi Bali, (2) penelitian selanjutnya dapat melakukan wawancara kepada staf organisasi perangkat daerah yang menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) untuk memperoleh data yang lebih akurat atas persepsi para pengguna.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Kami sebagai penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Bali Internasional dan khususnya Program Studi Ilmu Administrasi Niaga yang telah berkontribusi hingga artikel ini dapat selesai tepat pada waktunya.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, F. L. (2023). Wayan Koster Respons Cepat Penerapan Digitalisasi Informasi dan Wujudkan Sistem Transparan. *Tribun Bali*. <https://bali.tribunnews.com/2023/07/27/wayan-koster-respons-cepat-penerapan-digitalisasi-informasi-dan-wujudkan-sistem-transparan>
- Bawono, I. R. (2018). Manajemen Strategik Sektor Publik : Langkah Tepat Menuju *Good Governance*. *Jurnal Fakultas Ekonomi UNSOED Purwokerto*.
- Brawijaya, I. G. A., & Yenni Latrini, M. (2020). Efektivitas SIPKD, Gaya Kepemimpinan, dan Lingkungan Kerja Pada Kinerja Karyawan Dinas Pariwisata Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i02.p18>
- Claudio, S. (2023). *Analisis Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah (SIPKD) pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur*. <http://repository.unwira.ac.id/13327/2/BAB I.pdf>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach. In *Research in Social Science: Interdisciplinary Perspectives*.
- Darmayani, Made Ayu dkk. (2014). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). *E-Jurnal SI Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, Buleleng*.
- Deviyanti, D. M., & Erlina Wati, N. W. A. (2022). Pengaruh Kualitas SDM, SIPKD, Audit Internal terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*. <https://doi.org/10.32795/hak.v3i3.2925>
- Dewi, Badera, I. D. N., & Wirama, D. G. (2017). Dukungan Manajemen Puncak, Kualitas Sistem, Kualitas Informasi Sebagai Prediktor Kepuasan Pengguna dan Implikasinya Pada Kinerja Pegawai. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*.
- Dewi, S. A. N. T. A. D. (2013). Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak, Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Pengguna Aktual Dan Kepuasan Pengguna Terhadap Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 4(1), 196–214.
- Evicahyani, S. I., & Setiawina, N. D. (2016). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*.
- Halim, A., Jaya, W. K., & Azis, N. (2012). Legalitas, Peluang, dan Hambatan Pembangunan Sistem Informasi Keuangan Negara dan Daerah (E-SIKD) yang Terintegrasi. *Kajian Tim Asistensi Kementerian Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal*.
- Handojo, A., Maharsi, S., & Aquaria, G. O. (2004). Pembuatan Sistem Informasi Akuntansi Terkomputerisasi Atas Siklus Pembelian dan Penjualan pada CV. X. *Jurnal Informatika*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Financial Economics*, 3(4), 305–360. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304->

405X(76)90026-X

- Khairunnas, Erawati, T., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Akuntansi*.
- Mahaputra, I. P. U. R., & Putra, I. W. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Udayana*, 8(2), 230–244. <https://doi.org/10.37905/jar.v2i1.29>
- Mardiasmo. (2006). Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1).
- Parnami, N. P., & Damayanthi, I. G. A. E. (2013). Penilaian Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali. *Jurnal Aplikasi Bisni*.
- Rahmawati, H., Purwantini, A. H., & Maharani, B. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Kualitas Sistem Informasi Akuntansi, dan Kesesuaian Tugas Teknologi terhadap Kinerja Pegawai. *Accounting Research Journal*, 2(1), 102–119.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2014). *Accounting Information Systems*. Prentice Hall.
- Sari, D. (2013). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Penyelesaian Temuan Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah & Implikasinya Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. *Indonesian Journal Of Economics And Business IJEB*.
- Senge, R. (1990). *The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization*. Currency Doubleday, New York, NY. <https://doi.org/10.1002/pfi.4170300510>
- Suryaningrat, A. A. A. M., & Utama, I. M. S. (2018). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pada Pemerintah Provinsi Bali. *Buletin Studi Ekonomi*.
- Wansyah, H., Darwanis, & Bakar, U. (2012). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kegiatan Pengendalian terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan SKPD Pada Provinsi Aceh. *Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*.
- Wartini, N. N., & Yasa, I. G. W. M. (2016). Analisis Efektivitas Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Pemerintah Kabupaten Jembrana. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas*.
- Wicaksono, R., & Mispiyanti, D. (2019). Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pada Aparatur Pemerintah Daerah. In *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*.
- Winarni, E., Kurniasih, E. T., & Soleh, A. (2020). Dampak Penerapan Good Governance, Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Penerapan SPIP dan Pemanfaatan SIPKD Terhadap Akuntabilitas Publik Dan Kualitas Laporan Keuangan (Pemerintah Kota Jambi). *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*. <https://doi.org/10.33087/jmas.v5i2.197>